

Rekonstruksi Citra Guru Bimbingan dan Konseling: Dari “Polisi Sekolah” Menuju Mitra Perkembangan Generasi Z

Claris Fransiscan Bilasi¹, Naufal Faiis Prasetyo², Lobby Loekmono³, Maya Rahadian Septiningtyas⁴

Universitas Kristen Satya Wacana

e-mail: 132023016@student.uksw.edu, 132023030@student.uksw.edu

ABSTRAK

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah masih menghadapi stigma sebagai "polisi sekolah" yang identik dengan hukuman dan pengawasan. Stigma ini menghambat peserta didik, khususnya Generasi Z, untuk memanfaatkan layanan konseling secara terbuka. Artikel ini bertujuan menganalisis akar terbentuknya stigma tersebut, karakteristik Generasi Z yang relevan bagi layanan BK, serta strategi rekonstruksi citra guru BK menuju pendekatan yang lebih humanis dan berbasis perkembangan. Melalui kajian konseptual, artikel ini merumuskan implikasi praktis bagi ekosistem sekolah dalam mewujudkan layanan BK yang dipercaya peserta didik.

Kata kunci: Bimbingan dan Konseling, Citra Guru BK, Generasi Z, Stigma Sekolah, Layanan Humanis.

Article History

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Plagirism Checker No 77

Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Liberosis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

I. PENDAHULUAN

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik pada aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier melalui layanan yang bersifat komprehensif, preventif, developmental, dan kuratif. Di Indonesia, penyelenggaraan layanan BK telah diatur secara resmi melalui Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa layanan BK tidak hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang mengalami masalah, tetapi ditujukan kepada seluruh peserta didik sebagai bagian dari proses perkembangan yang optimal. Meskipun layanan bimbingan dan konseling telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa peserta didik masih memandang guru BK sebagai figur yang identik dengan penegakan disiplin dan penanganan pelanggaran tata tertib sekolah. Persepsi tersebut menyebabkan layanan BK belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pengembangan pribadi, sosial, belajar, maupun karier peserta didik (Septiningtyas, 2020; Permendikbud No. 111 Tahun 2014).

Salah satu stigma yang masih melekat hingga saat ini adalah anggapan bahwa guru BK merupakan “polisi sekolah”, yaitu figur yang identik dengan penegakan tata tertib, pemberian hukuman, dan penanganan peserta didik yang melakukan pelanggaran. Persepsi tersebut terbentuk akibat praktik penyelenggaraan layanan BK yang dalam berbagai konteks sekolah masih lebih banyak dilibatkan dalam fungsi disipliner dibandingkan fungsi

perkembangan peserta didik. Kondisi ini menyebabkan ruang BK sering dipersepsikan sebagai tempat bagi peserta didik yang bermasalah sehingga mengurangi kepercayaan peserta didik terhadap layanan konseling. Temuan penelitian Norman C. Gysbers dan Patricia Henderson menunjukkan bahwa ketika konselor sekolah lebih banyak menjalankan tugas administratif maupun disipliner daripada layanan konseling perkembangan, efektivitas program bimbingan dan konseling cenderung menurun dan akses peserta didik terhadap layanan menjadi semakin terbatas (Gysbers & Henderson, 2012).

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Penelitian Carol A. Dahir dan Carolyn Stone menunjukkan bahwa di berbagai negara, konselor sekolah masih sering mengalami *role ambiguity* dan *role conflict*, yaitu ketidakjelasan peran akibat penugasan di luar fungsi profesionalnya, seperti penegakan disiplin, administrasi sekolah, maupun tugas nonkonseling lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya persepsi peserta didik terhadap fungsi konselor sekolah sebagai sumber bantuan psikologis (Dahir & Stone, 2012).

Stigma terhadap guru BK juga berdampak pada perilaku pencarian bantuan (*help-seeking behavior*) peserta didik. Penelitian yang dilakukan oleh Rickwood dkk. (2005) menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap konselor merupakan salah satu faktor utama yang menghambat remaja untuk mencari bantuan profesional ketika mengalami masalah psikologis. Sebaliknya, hubungan yang dilandasi rasa aman, kepercayaan, dan penerimaan terbukti meningkatkan kecenderungan peserta didik untuk memanfaatkan layanan konseling secara sukarela. Temuan ini memperlihatkan bahwa citra profesional konselor memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas layanan BK di sekolah.

Urgensi rekonstruksi citra guru BK semakin meningkat seiring dengan perubahan karakteristik peserta didik yang saat ini didominasi oleh Generasi Z. Generasi yang lahir pada era digital ini memiliki karakteristik sebagai *digital natives*, terbiasa memperoleh informasi secara cepat, menghargai hubungan interpersonal yang autentik, memiliki kesadaran tinggi terhadap isu kesehatan mental, serta lebih menyukai hubungan yang bersifat kolaboratif daripada hierarkis. Menurut Jean M. Twenge (2017), Generasi Z menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi dalam membicarakan kesehatan mental, mencari dukungan psikologis, serta mengharapkan komunikasi yang terbuka dan egaliter dari figur dewasa. Karakteristik tersebut diperkuat oleh penelitian Corey Seemiller dan Meghan Grace (2019) yang menyatakan bahwa Generasi Z lebih menghargai pemimpin dan pendidik yang autentik, mudah diakses, responsif, dan mampu membangun hubungan personal dibandingkan figur otoritatif yang menjaga jarak.

Dalam perspektif konseling humanistik, kualitas hubungan antara konselor dan konseli merupakan determinan utama keberhasilan proses konseling. Carl R. Rogers (1957) menegaskan bahwa empati, penerimaan tanpa syarat (*unconditional positive regard*), dan kongruensi merupakan kondisi inti yang memungkinkan individu berkembang secara optimal. Dengan demikian, citra guru BK sebagai figur yang menakutkan bertentangan dengan prinsip dasar hubungan konseling yang menempatkan konselor sebagai mitra perkembangan peserta didik. Dalam konteks Indonesia, penelitian Septiningtyas (2020) mengenai identitas profesional guru BK menunjukkan bahwa identitas profesional konselor dibentuk melalui interaksi antara kompetensi profesional, pengalaman praktik, budaya sekolah, serta persepsi masyarakat terhadap profesi BK. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa ketidakjelasan peran (*role ambiguity*) dan ekspektasi sekolah terhadap fungsi disipliner guru BK masih menjadi tantangan utama dalam pembentukan identitas profesional konselor. Namun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji

bagaimana perubahan karakteristik peserta didik Generasi Z menuntut rekonstruksi citra guru BK sebagai bagian dari penguatan identitas profesional.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas profesionalisme guru BK, implementasi layanan BK komprehensif, maupun identitas profesional konselor. Namun, sebagian besar penelitian masih memosisikan isu-isu tersebut secara terpisah. Penelitian mengenai identitas profesional lebih banyak berfokus pada kompetensi dan pengalaman guru BK, sedangkan penelitian mengenai Generasi Z lebih menitikberatkan pada karakteristik peserta didik tanpa mengaitkannya dengan perubahan identitas profesional konselor. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan konseptual mengenai bagaimana perubahan karakteristik peserta didik seharusnya mendorong rekonstruksi citra guru BK sebagai bagian dari transformasi layanan BK di sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis akar terbentuknya stigma guru BK sebagai “polisi sekolah”, mengkaji perubahan karakteristik Generasi Z yang memengaruhi praktik layanan bimbingan dan konseling, serta menjelaskan urgensi rekonstruksi citra guru BK sebagai bagian dari penguatan identitas profesional konselor sekolah. Lebih lanjut, artikel ini menawarkan suatu kerangka konseptual mengenai guru BK sebagai mitra perkembangan peserta didik, yang mengintegrasikan perspektif layanan BK komprehensif, identitas profesional konselor, dan karakteristik Generasi Z sebagai landasan pengembangan layanan BK yang humanis, kolaboratif, dan berorientasi pada perkembangan.

II. METODE

Artikel ini menggunakan metode kajian konseptual (*conceptual review*) melalui pendekatan studi literatur (*literature review*). Metode ini digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan berbagai konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan citra guru Bimbingan dan Konseling (BK), identitas profesional konselor sekolah, layanan BK komprehensif, karakteristik Generasi Z, dan pendekatan konseling humanistik.

Sumber kajian diperoleh dari berbagai literatur akademik berupa buku, regulasi pendidikan, serta artikel ilmiah yang relevan dengan fokus pembahasan. Literatur utama yang digunakan meliputi kajian mengenai program bimbingan dan konseling komprehensif oleh Gysbers dan Henderson, konsep hubungan konseling humanistik oleh Rogers, karakteristik Generasi Z oleh Seemiller dan Grace serta Twenge, serta penelitian mengenai identitas profesional guru BK dan persepsi peserta didik terhadap layanan konseling.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu identifikasi sumber literatur yang relevan, pengkajian konsep dan temuan penelitian terdahulu, serta sintesis berbagai perspektif untuk membangun pemahaman mengenai faktor penyebab munculnya stigma “polisi sekolah” dan strategi rekonstruksi citra guru BK sebagai mitra perkembangan peserta didik. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-argumentatif untuk menggambarkan urgensi perubahan paradigma layanan BK yang lebih humanis, kolaboratif, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 TRANSFORMASI PERAN GURU BK: DARI DISIPLIN KE PENDAMPINGAN PERKEMBANGAN

Transformasi layanan bimbingan dan konseling di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai perubahan terminologi semata, melainkan sebagai bagian dari

pergeseran paradigma pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang berkembang secara utuh. Secara historis, implementasi layanan bimbingan di sekolah-sekolah Indonesia pada dekade 1970-1980-an masih didominasi oleh pendekatan remedial yang berorientasi pada penyelesaian masalah perilaku, pelanggaran tata tertib, serta penyesuaian diri peserta didik. Pada masa tersebut, Bimbingan Penyuluhan (BP) lebih banyak diposisikan sebagai instrumen sekolah dalam menjaga ketertiban sehingga guru BP identik dengan penanganan peserta didik yang dianggap bermasalah. Konsekuensinya, ruang BK lebih dikenal sebagai ruang pemeriksaan daripada ruang pendampingan perkembangan. Meskipun paradigma layanan telah mengalami perubahan, konstruksi sosial tersebut masih bertahan dan menjadi salah satu akar terbentuknya stigma guru BK sebagai “polisi sekolah”.

Perubahan mendasar mulai terjadi ketika perkembangan ilmu konseling menggeser orientasi layanan dari pendekatan yang bersifat kuratif menuju pendekatan perkembangan (*developmental counseling*). Pergantian nomenklatur dari Bimbingan Penyuluhan (BP) menjadi Bimbingan dan Konseling (BK) pada dekade 1990-an bukan sekadar perubahan istilah administratif, tetapi mencerminkan transformasi filosofis mengenai hakikat layanan BK. Dalam paradigma ini, konselor sekolah tidak lagi dipandang sebagai penyelesai masalah (*problem solver*), melainkan sebagai fasilitator perkembangan yang mendampingi seluruh peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal. Gagasan tersebut sejalan dengan pendekatan Developmental Guidance yang dikembangkan oleh Norman C. Gysbers dan Patricia Henderson, yang menegaskan bahwa layanan BK harus dirancang secara komprehensif, sistematis, dan dapat diakses oleh seluruh peserta didik, bukan hanya mereka yang mengalami masalah perilaku (Gysbers & Henderson, 2012).

Paradigma perkembangan tersebut kemudian diadopsi dalam kebijakan nasional melalui Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 yang menempatkan layanan BK sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa layanan BK diselenggarakan melalui komponen layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik pada aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier. Dengan demikian, orientasi layanan BK bergeser dari pendekatan yang berfokus pada “siapa yang bermasalah” menjadi “bagaimana seluruh peserta didik dapat berkembang secara optimal”.

Transformasi paradigma tersebut semakin diperkuat oleh Comprehensive School Counseling Program (CSCP) yang kemudian diinstitusionalisasikan melalui American School Counselor Association National Model. Model ini menempatkan konselor sekolah sebagai agen perkembangan yang bekerja melalui kolaborasi dengan guru, orang tua, pimpinan sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BK komprehensif berkontribusi terhadap peningkatan prestasi akademik, perkembangan sosial-emosional, keterlibatan peserta didik di sekolah, serta kesiapan karier (Carey & Dimmitt, 2012; Sink & Stroh, 2003). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan layanan BK tidak lagi diukur dari banyaknya kasus yang diselesaikan, tetapi dari kontribusinya terhadap perkembangan seluruh peserta didik.

Namun demikian, perubahan konseptual tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan praktik layanan di sekolah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa

guru BK masih sering memperoleh tugas di luar mandat profesionalnya, seperti menangani kedisiplinan, administrasi sekolah, pengawasan peserta didik, hingga berbagai tugas administratif lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan *role ambiguity* dan *role conflict*, yaitu ketidaksesuaian antara identitas profesional konselor dengan ekspektasi organisasi sekolah (Dahir & Stone, 2012). Akibatnya, layanan BK komprehensif belum dapat diimplementasikan secara optimal meskipun telah memperoleh landasan regulasi yang kuat. Fenomena tersebut juga ditemukan dalam konteks Indonesia. Penelitian Septiningtyas (2020) mengenai identitas profesional guru BK melalui wawancara mendalam terhadap 33 guru BK dari jenjang SD, SMP, dan SMA menunjukkan bahwa identitas profesional guru BK dibentuk melalui interaksi yang kompleks antara kompetensi profesional, pengalaman praktik, budaya organisasi sekolah, serta persepsi masyarakat terhadap profesi BK. Penelitian tersebut menemukan bahwa ketidakjelasan peran (*role ambiguity*) masih menjadi tantangan utama karena guru BK kerap menjalankan fungsi-fungsi nonkonseling, seperti penegakan disiplin, administrasi sekolah, maupun penyelesaian persoalan kedisiplinan peserta didik. Lebih jauh, penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya memengaruhi cara guru BK memaknai identitas profesionalnya, tetapi juga membentuk persepsi peserta didik yang lebih mengenal guru BK sebagai pengawas perilaku daripada sebagai fasilitator perkembangan. Temuan ini memperlihatkan bahwa transformasi layanan BK pada dasarnya merupakan persoalan rekonstruksi identitas profesional, bukan sekadar perubahan struktur organisasi atau kebijakan pendidikan.

Perubahan karakteristik peserta didik pada era digital semakin mempertegas urgensi transformasi tersebut. Generasi Z tumbuh dalam lingkungan yang menghargai keterbukaan, autentisitas, komunikasi yang setara, serta hubungan interpersonal yang dibangun atas dasar kepercayaan. Penelitian Jean M. Twenge (2017) menunjukkan bahwa Generasi Z lebih terbuka terhadap isu kesehatan mental dan lebih bersedia mencari bantuan psikologis ketika mereka memandang figur dewasa sebagai sosok yang aman dan dapat dipercaya. Temuan tersebut diperkuat oleh Corey Seemiller dan Meghan Grace (2019) yang menyatakan bahwa Generasi Z lebih menghargai pendidik yang autentik, mudah diakses, responsif, dan mampu membangun hubungan personal dibandingkan figur yang mempertahankan relasi otoritatif.

Dengan demikian, transformasi peran guru BK tidak cukup diwujudkan melalui perubahan nomenklatur profesi ataupun regulasi kelembagaan. Transformasi tersebut harus dimulai dari rekonstruksi identitas profesional guru BK yang tercermin dalam cara guru BK memandang perannya, membangun hubungan dengan peserta didik, serta mengimplementasikan layanan konseling di sekolah. Sebagaimana ditunjukkan oleh Septiningtyas (2020), identitas profesional guru BK berkembang melalui pengalaman praktik dan interaksi sosial yang berlangsung di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, perubahan citra guru BK sebagai mitra perkembangan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu guru BK, tetapi juga memerlukan dukungan budaya sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, kolaborasi lintas profesi, serta kebijakan kelembagaan yang konsisten dengan paradigma layanan BK komprehensif. Dalam konteks Generasi Z, rekonstruksi tersebut mengarah pada lahirnya figur guru BK sebagai *trusted adult*, yaitu pendidik profesional yang mampu membangun hubungan yang aman, autentik, empatik, dan kolaboratif. Pergeseran inilah yang

menjadi fondasi utama dalam merekonstruksi citra guru BK dari “polisi sekolah” menuju mitra perkembangan peserta didik.

3.2 AKAR STIGMA “POLISI SEKOLAH”

Stigma guru Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai “polisi sekolah” bukanlah persepsi yang muncul secara spontan, melainkan merupakan konstruksi sosial yang berkembang melalui interaksi antara budaya sekolah, kebijakan kelembagaan, pengalaman peserta didik, serta cara masyarakat memaknai profesi guru BK. Dalam perspektif konstruksionisme sosial, citra suatu profesi dibentuk melalui pengalaman kolektif yang terus direproduksi dalam praktik sehari-hari sehingga akhirnya diterima sebagai realitas sosial. Oleh karena itu, stigma terhadap guru BK tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan persepsi peserta didik, tetapi merupakan refleksi dari bagaimana sekolah mengonstruksi, mendistribusikan, dan mempraktikkan peran guru BK dalam kehidupan sekolah. Dalam perspektif identitas profesional, persepsi negatif tersebut menjadi tantangan yang sangat mendasar karena hubungan konseling dibangun di atas kepercayaan (*trust*). Ketika guru BK lebih dikenal sebagai penegak disiplin daripada pendamping perkembangan, peserta didik cenderung memaknai kehadiran guru BK sebagai representasi kontrol sosial, bukan sebagai figur profesional yang memberikan bantuan psikologis. Akibatnya, hubungan konseling tidak dimulai dari rasa aman (*psychological safety*), melainkan dari kecemasan, kewaspadaan, bahkan ketidakpercayaan.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Septiningtyas (2020) mengenai identitas profesional guru BK di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa identitas profesional guru BK tidak hanya dibentuk oleh kompetensi konselor, tetapi juga oleh budaya organisasi sekolah, ekspektasi kepala sekolah, guru mata pelajaran, orang tua, serta persepsi peserta didik terhadap profesi BK. Ketika sekolah lebih banyak memosisikan guru BK sebagai penanggung jawab kedisiplinan daripada fasilitator perkembangan, identitas profesional guru BK mengalami *role ambiguity*, sehingga citra profesi berkembang ke arah fungsi kontrol daripada fungsi perkembangan. Dengan demikian, stigma “polisi sekolah” pada dasarnya merupakan konsekuensi dari ketidaksesuaian antara paradigma profesional bimbingan dan konseling dengan praktik kelembagaan yang masih berlangsung di sekolah.

3.2.1 Penempatan Struktural yang Kurang Tepat

Faktor pertama yang melanggengkan stigma guru BK sebagai “polisi sekolah” adalah penempatan guru BK dalam struktur organisasi sekolah yang masih berorientasi pada fungsi penegakan disiplin. Dalam berbagai praktik di sekolah, guru BK masih diberi tanggung jawab menangani keterlambatan, pelanggaran tata tertib, perkelahian antarpeserta didik, hingga memberikan rekomendasi sanksi atas berbagai bentuk pelanggaran. Penugasan tersebut secara tidak langsung membangun asosiasi bahwa setiap peserta didik yang memasuki ruang BK adalah mereka yang sedang menghadapi masalah atau menerima konsekuensi atas perilakunya.

Dalam perspektif *Comprehensive School Counseling Program*, kondisi tersebut menunjukkan terjadinya penyimpangan terhadap mandat profesional konselor sekolah. Carol A. Dahir dan Carolyn Stone menjelaskan bahwa keterlibatan konselor sekolah pada fungsi-fungsi nonkonseling menimbulkan

role conflict dan *role ambiguity*, sehingga mengurangi efektivitas layanan konseling serta membatasi akses peserta didik terhadap layanan bantuan psikologis (Dahir & Stone, 2012).

Temuan tersebut selaras dengan penelitian Septiningtyas (2020) yang memperlihatkan bahwa sebagian guru BK di Indonesia masih memaknai profesinya melalui tuntutan organisasi sekolah yang lebih menekankan fungsi pengawasan dibandingkan fungsi perkembangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa stigma "polisi sekolah" tidak lahir dari perilaku individual guru BK, melainkan merupakan produk dari sistem sekolah yang belum sepenuhnya mengimplementasikan paradigma layanan BK komprehensif.

3.2.2 Pola Komunikasi yang Bersifat Menghakimi

Selain faktor struktural, kualitas komunikasi yang dibangun guru BK juga berkontribusi terhadap pembentukan stigma negatif. Dalam beberapa praktik layanan, pendekatan komunikasi masih didominasi oleh pertanyaan yang bersifat interogatif, pemberian nasihat secara sepihak, atau kecenderungan untuk segera memberikan solusi tanpa terlebih dahulu memahami pengalaman subjektif peserta didik. Pola komunikasi tersebut berpotensi menciptakan pengalaman konseling yang kurang nyaman sehingga peserta didik merasa dihakimi, bukan dipahami.

Dalam teori konseling humanistik, Carl R. Rogers (1957) menegaskan bahwa hubungan konseling yang efektif dibangun melalui tiga kondisi utama, yaitu empati (*empathy*), penerimaan tanpa syarat (*unconditional positive regard*), dan kongruensi (*congruence*). Ketiga kondisi tersebut memungkinkan konseli merasa aman untuk mengekspresikan pengalaman dan perasaannya secara terbuka. Sebaliknya, komunikasi yang berorientasi pada penilaian dan kontrol akan menghambat terbentuknya hubungan terapeutik. Dalam konteks Generasi Z, kebutuhan terhadap komunikasi yang autentik menjadi semakin penting karena generasi ini cenderung lebih responsif terhadap figur dewasa yang menunjukkan kepedulian, keterbukaan, dan penghargaan terhadap perspektif mereka (Twenge, 2017; Seemiller & Grace, 2019).

3.2.3 Kurangnya Sosialisasi tentang Hakikat Layanan BK

Faktor lain yang memperkuat stigma adalah masih rendahnya literasi warga sekolah mengenai fungsi dan ruang lingkup layanan BK. Tidak sedikit peserta didik, guru mata pelajaran, bahkan orang tua yang masih memandang layanan BK sebagai layanan yang hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang bermasalah. Persepsi tersebut muncul karena sosialisasi mengenai tujuan, prinsip, dan bentuk layanan BK belum dilakukan secara sistematis sejak peserta didik memasuki lingkungan sekolah.

Menurut model Comprehensive School Counseling Program yang dikembangkan oleh Norman C. Gysbers dan diperkuat oleh American School Counselor Association, layanan BK seharusnya dipandang sebagai bagian integral dari proses pendidikan yang mendukung perkembangan seluruh peserta didik. Oleh karena itu, keberhasilan layanan BK tidak hanya ditentukan oleh kompetensi guru BK, tetapi juga oleh pemahaman seluruh warga sekolah terhadap fungsi layanan tersebut. Ketika sosialisasi tidak dilakukan secara

optimal, ruang kosong informasi akan diisi oleh pengalaman negatif dan cerita antarteman sebaya yang terus memperkuat stigma "polisi sekolah".

3.2.4 Dampak Stigma terhadap Pemanfaatan Layanan BK

Akumulasi dari berbagai faktor tersebut berdampak langsung terhadap rendahnya kecenderungan peserta didik untuk memanfaatkan layanan BK. Penelitian Rickwood dkk. (2005) menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap konselor sekolah merupakan salah satu faktor utama yang menghambat perilaku mencari bantuan (*help-seeking behavior*) pada remaja. Peserta didik yang memandang konselor sebagai figur yang menghakimi atau identik dengan hukuman cenderung memilih menyimpan masalahnya sendiri, bercerita kepada teman sebaya, atau mencari informasi melalui media sosial yang belum tentu akurat. Kondisi ini menyebabkan berbagai permasalahan akademik, sosial, emosional, maupun kesehatan mental sering kali tidak teridentifikasi sejak dini.

Dalam konteks Indonesia, temuan Septiningtyas (2020) memperlihatkan bahwa tantangan terbesar profesi guru BK bukan semata-mata berkaitan dengan kompetensi konselor, melainkan juga menyangkut pembentukan identitas profesional yang masih dipengaruhi oleh persepsi negatif masyarakat sekolah. Oleh karena itu, rekonstruksi citra guru BK perlu dipahami sebagai upaya membangun kembali kepercayaan peserta didik terhadap layanan BK melalui penguatan identitas profesional, perubahan budaya sekolah, serta implementasi layanan yang lebih humanis, kolaboratif, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik.

3.3 Karakteristik Generasi Z dan Relevansinya bagi Layanan BK

Generasi Z merupakan kelompok peserta didik yang saat ini mendominasi jenjang pendidikan menengah. Berbeda dengan generasi sebelumnya, Generasi Z lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang telah terintegrasi dengan teknologi digital sehingga memiliki karakteristik, pola komunikasi, serta kebutuhan psikososial yang berbeda. Oleh karena itu, memahami karakteristik Generasi Z tidak hanya menjadi bagian dari kajian demografis, tetapi merupakan prasyarat dalam merancang layanan bimbingan dan konseling yang relevan, adaptif, dan efektif. Ketidaksesuaian antara karakteristik peserta didik dengan pendekatan layanan yang diberikan berpotensi memperlebar jarak psikologis antara guru BK dan peserta didik, sehingga memperkuat stigma bahwa layanan BK bukan merupakan ruang yang aman untuk memperoleh bantuan.

Penelitian Jean M. Twenge (2017) menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, terutama dalam cara membangun relasi interpersonal, mengakses informasi, serta memandang kesehatan mental. Sementara itu, Corey Seemiller dan Meghan Grace (2019) menjelaskan bahwa Generasi Z mengharapkan figur pendidik yang autentik, mudah diakses, kolaboratif, dan mampu membangun hubungan yang dilandasi rasa saling percaya. Karakteristik tersebut membawa implikasi penting terhadap penyelenggaraan layanan BK di sekolah.

3.3.1 Digital Native yang Menghargai Responsivitas

Generasi Z dikenal sebagai digital natives, yaitu generasi yang sejak masa kanak-kanak telah terbiasa menggunakan internet, media sosial, dan perangkat digital dalam berbagai aspek kehidupan (Prensky, 2001). Paparan teknologi yang intensif membentuk pola berpikir yang cepat, kemampuan mengakses informasi secara instan, serta ekspektasi terhadap respons yang segera. Dalam konteks layanan BK, kondisi tersebut menyebabkan pendekatan layanan yang terlalu birokratis, prosedural, dan membutuhkan waktu yang panjang sering kali dipersepsikan kurang relevan.

Penelitian Seemiller dan Grace (2019) menunjukkan bahwa Generasi Z lebih menyukai pendidik yang mudah dihubungi, memberikan umpan balik secara cepat, serta mampu memanfaatkan teknologi sebagai media komunikasi. Oleh karena itu, guru BK perlu mengembangkan layanan yang lebih fleksibel, seperti pemanfaatan media digital untuk konsultasi awal, penyebaran informasi psikopedagogis melalui media sosial, maupun penggunaan platform daring sebagai pelengkap layanan tatap muka. Responsivitas tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses konseling secara langsung, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap pola komunikasi peserta didik pada era digital.

3.3.2 Pencari Keaslian (*Authenticity Seekers*)

Salah satu karakteristik khas Generasi Z adalah tingginya penghargaan terhadap keaslian (*authenticity*) dalam hubungan interpersonal. Mereka cenderung mampu membedakan antara komunikasi yang tulus dengan komunikasi yang bersifat formal atau sekadar menjalankan peran institusional. Menurut Seemiller dan Grace (2019), Generasi Z lebih mudah membangun kepercayaan kepada figur dewasa yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan tindakan, bersedia mendengarkan tanpa menghakimi, serta mampu mengakui keterbatasan dirinya.

Dalam perspektif konseling humanistik, karakteristik tersebut sejalan dengan konsep kongruensi (*congruence*) yang dikemukakan oleh Carl R. Rogers (1957), yaitu kemampuan konselor untuk hadir secara autentik dalam hubungan konseling. Rogers menegaskan bahwa konseli akan lebih mudah membuka diri ketika konselor menunjukkan empati, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian dalam berinteraksi. Dengan demikian, guru BK yang membangun hubungan secara autentik akan lebih mudah memperoleh kepercayaan peserta didik dibandingkan guru BK yang mempertahankan jarak profesional secara berlebihan.

3.3.3 Kesadaran Tinggi terhadap Kesehatan Mental

Berbeda dengan generasi sebelumnya, Generasi Z tumbuh pada masa ketika isu kesehatan mental semakin banyak diperbincangkan di ruang publik. Mereka relatif lebih familiar dengan istilah seperti *anxiety*, *burnout*, *stress management*, *self-care*, dan *psychological well-being*. Menurut Twenge (2017), meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan mental merupakan salah satu karakteristik menonjol Generasi Z yang dipengaruhi oleh perkembangan media digital dan semakin terbukanya diskusi mengenai kesejahteraan psikologis.

Kesadaran tersebut memberikan peluang sekaligus tantangan bagi layanan BK. Di satu sisi, peserta didik memiliki literasi yang lebih baik mengenai kondisi psikologis yang mereka alami sehingga lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan bantuan. Namun, di sisi lain mereka juga memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan konseling yang diberikan. Guru BK dituntut tidak hanya memiliki kompetensi profesional, tetapi juga mampu menciptakan hubungan yang aman secara psikologis (*psychological safety*) sehingga peserta didik merasa nyaman untuk mengungkapkan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

3.3.4 Preferensi terhadap Relasi yang Setara dan Bebas Stigma

Karakteristik lain yang menonjol adalah kecenderungan Generasi Z untuk menghargai hubungan yang bersifat egaliter dan kolaboratif. Mereka kurang menyukai pendekatan yang menempatkan peserta didik sebagai objek yang harus dikontrol atau diperbaiki. Sebaliknya, mereka mengharapkan keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya.

Dalam perspektif konseling, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *person-centered counseling* yang menempatkan konseli sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk berkembang ketika memperoleh lingkungan yang suportif (Rogers, 1957). Oleh karena itu, layanan BK perlu bergeser dari pendekatan yang bersifat direktif menuju hubungan kolaboratif yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk menyampaikan pandangan, menentukan tujuan konseling, serta berpartisipasi aktif dalam proses pemecahan masalah.

Temuan Septiningtyas (2020) mengenai identitas profesional guru BK di Indonesia semakin memperkuat argumentasi tersebut. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembentukan identitas profesional guru BK sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan yang dibangun dengan peserta didik. Guru BK yang mampu menampilkan diri sebagai pendamping perkembangan, membangun komunikasi yang hangat, serta menunjukkan kepedulian yang autentik cenderung memperoleh kepercayaan yang lebih tinggi dari peserta didik dibandingkan guru BK yang lebih berorientasi pada fungsi kontrol dan penegakan disiplin. Hal ini menunjukkan bahwa rekonstruksi citra guru BK tidak dapat dipisahkan dari kemampuan membangun relasi yang humanis dan kolaboratif sesuai dengan karakteristik Generasi Z.

3.3.5 Sintesis

Karakteristik Generasi Z menunjukkan bahwa efektivitas layanan BK tidak lagi hanya ditentukan oleh penguasaan teknik konseling, tetapi juga oleh kemampuan guru BK membangun hubungan yang responsif, autentik, aman, dan kolaboratif. Pergeseran karakteristik peserta didik tersebut menuntut perubahan paradigma dari layanan yang berorientasi pada penyelesaian masalah menuju layanan yang berpusat pada perkembangan (*developmental counseling*). Oleh karena itu, rekonstruksi citra guru BK sebagai mitra perkembangan menjadi semakin relevan dalam konteks pendidikan abad ke-21. Guru BK perlu dipersepsikan sebagai *trusted adult*, yaitu figur profesional

yang tidak hanya memiliki kompetensi konseling, tetapi juga mampu menghadirkan rasa aman, penghargaan, dan dukungan bagi peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan.

IV. KESIMPULAN

Stigma guru Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai “polisi sekolah” merupakan permasalahan yang terbentuk melalui konstruksi sosial dan praktik kelembagaan yang masih menempatkan guru BK pada fungsi pengawasan serta penanganan pelanggaran, dibandingkan sebagai fasilitator perkembangan peserta didik. Kondisi tersebut menyebabkan adanya jarak antara paradigma profesional layanan BK yang bersifat komprehensif dan perkembangan dengan persepsi peserta didik terhadap peran guru BK di sekolah.

Perubahan karakteristik peserta didik, khususnya Generasi Z, semakin menegaskan pentingnya rekonstruksi citra guru BK. Generasi Z membutuhkan figur pendidik yang autentik, responsif, mudah diakses, serta mampu membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan rasa aman. Oleh karena itu, layanan BK tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian masalah, tetapi perlu diarahkan pada pendekatan perkembangan yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang.

Rekonstruksi citra guru BK dapat dilakukan melalui penguatan identitas profesional konselor, penerapan komunikasi yang humanis, pembangunan hubungan konseling yang empatik dan autentik, serta dukungan budaya sekolah yang memahami hakikat layanan BK. Dengan demikian, guru BK tidak lagi dipersepsikan sebagai figur yang mengontrol perilaku peserta didik, melainkan sebagai *trusted adult* dan mitra perkembangan yang membantu peserta didik menghadapi tantangan pribadi, sosial, belajar, dan karier. Perubahan citra tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepercayaan peserta didik serta mengoptimalkan kebermanfaatan layanan BK di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Corey, G. (2017). *Theory and practice of counseling and psychotherapy* (10th ed.). Cengage Learning.
- Gysbers, N. C., & Henderson, P. (2012). *Developing and managing your school guidance and counseling program* (5th ed.). American Counseling Association.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kemendikbud.
- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1-6.
- Rogers, C. R. (1961). *On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy*. Houghton Mifflin.
- Seemiller, C., & Grace, M. (2016). *Generation Z goes to college*. Jossey-Bass.
- Sukardi, D. K. (2002). *Pengantar pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah*. Rineka Cipta.
- Yusuf, S., & Nurihsan, J. (2010). *Landasan bimbingan dan konseling*. Remaja Rosdakarya.